

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan keamanan maritim khususnya di wilayah Asia Tenggara dalam kurun waktu 10-15 tahun terakhir telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Keadaan ini tidak terlepas dari pengaruh lingkungan strategis keamanan global dimana fenomena baru berupa ancaman terhadap keamanan maritim dunia telah muncul dan menjadi tantangan nyata bagi negara-negara. Khususnya bagi negara yang memiliki wilayah teritorial berupa laut.

Negara-negara yang terletak di Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN yang umumnya adalah negara maritim (wilayahnya memiliki laut). Alur laut utama di Asia Tenggara terbatas pada selat-selat utama seperti Selat Malaka dan Selat Singapura, Selat Sunda, dan Selat Lombok.¹ Selat Malaka memiliki panjang 500 mil dan menyediakan koridor utama antara Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan.² Pelabuhan yang terletak di sepanjang Selat Malaka dan Singapura meliputi Singapura dan juga pelabuhan utama Malaysia. Sehingga selat malaka meliputi wilayah perairan dan batas negara yang saling berdekatan antar negara, sehingga menyebabkan banyaknya permasalahan negara maupun non negara

¹ Lee Kuan Yew *The Security of Sea Lanes in Southeast Asia "Major Sea Lanes in Southeast Asia"* hal 559

² Felipe Umaña, *Threat Convergence Transnational Security Threats in the Strait of Malacca*, <http://library.fundforpeace.org/library/ttcvr1213-threatconvergence-malaccastraits-08e.pdf>, diakses pada 12 Februari 2021

Sebagai salah satu jalur laut tersibuk di dunia, Selat malaka memiliki nilai strategis bagi kapal dagang dan jalur kapal yang melakukan kegiatan transit. Hampir 90% komoditas dan kebutuhan energi diangkut dari satu negara ke negara lain melalui domain laut.³ Tingginya interaksi di wilayah ini juga memberikan potensi tindakan kejahatan yang bersifat lintas batas negara. Dan menjadi sumber potensi konflik yang menimbulkan gangguan dan mengancam keamanan transportasi laut di salah satu jalur transportasi laut tersibuk.

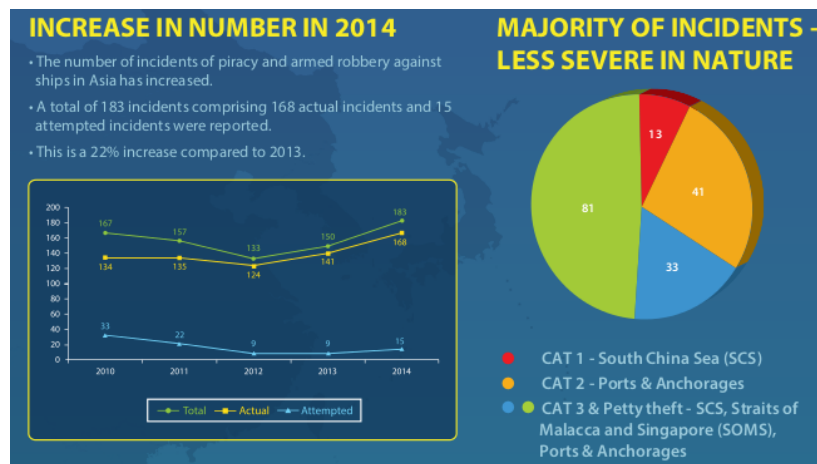
Wilayah perairan Selat malaka memiliki masalah terkait ancaman keamanan bersifat non tradisional. Salah satunya adalah pembajakan dan penyerangan kapal. Dalam hal ini pembajakan kapal atau yang disebut dengan perompakan merupakan salah satu masalah dan ancaman bagi keamanan kawasan selat malaka. Munculnya ancaman di wilayah ini disebabkan oleh daya tarik intensitas dan *traffic* yang cukup tinggi di wilayah selat malaka dengan membawa potensi dan kegiatan ekonomi yang cukup besar. Sehingga muncul kesempatan bagi oknum tidak bertanggung jawab memanfaatkan keadaan di wilayah laut yang memiliki tingkat keamanan yang cukup rentan, dikarenakan luasnya wilayah yang harus dicakup oleh pihak berwajib dan rentannya sektor keamanan kapal umum dan awak kapal.

Selat malaka menjadi begitu penting untuk pengangkutan minyak dan bahan baku serta untuk pengangkutan lalu lintas kontainer, navigasi kapal-kapal komersial yang bebas dan aman di jalur-jalur laut ini adalah suatu masalah penting. Dalam hal

³ James t. Conway, *A Cooperative Strategy for 21st Century Seapower*, Naval War College Review, Winter 2008, hal 8,

ini, pembajakan adalah salah satu ancaman besar terhadap keamanan *shipping* di jalur kawasan Selat Malaka.

Gambar 1. 1 Single-sheet Summary for Annual Report 2014.⁴

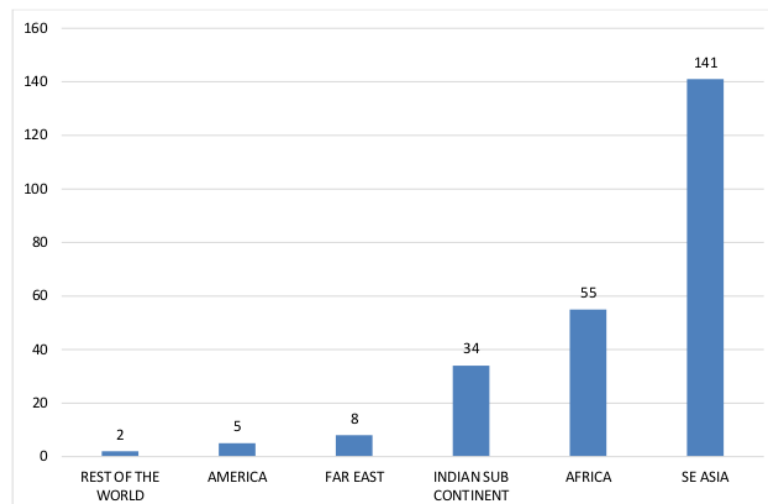


Data diatas merupakan insiden yang dilaporkan ReCAAP pada tahun 2014 di Asia, dari 183 kejadian, 45 diantaranya adalah insiden pembajakan dan 138 adalah insiden perampokan bersenjata terhadap kapal.⁵ Jumlah insiden yang dilaporkan pada tahun 2014 adalah yang tertinggi di antara periode pelaporan lima tahun (2010-2014).

⁴ ReCAAP ISC Annual Report 2014. Diunduh pada 7 Februari 2021

⁵ ReCAAP ISC Annual Report 2014. Diunduh pada 7 Februari 2021

Gambar 1. 2 Total insiden berdasarkan wilayah tahun 2014⁶

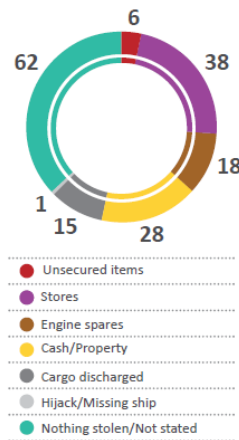


Berdasarkan data IMB Pada tahun 2014⁷ Wilayah Asia Tenggara merupakan wilayah yang tercatat memiliki insiden terbanyak dibanding wilayah lain, hal ini menunjukkan bagaimana traffic jalur laut internasional yang strategis namun tanpa memiliki kemampuan melindungi kawasan perairannya dari ancaman. Berakibat meningkatnya intensitas aktivitas tersebut. Kurangnya elemen pengamanan dan sarana yang memadai untuk mengamankan kawasan perairan Asia tenggara membuat para bajak laut dengan mudah melakukan serangan terhadap kapal umum.

⁶ ICC-IMB, *Piracy and Armed robbery Against Ships Annual Report 2014*. Diunduh pada 12 Februari 2021

⁷ ICC-IMB, *Piracy and Armed robbery Against Ships Annual Report 2014*. Diunduh pada 12 Februari 2021

Gambar 1. 3 Type of economic loses 2014⁸



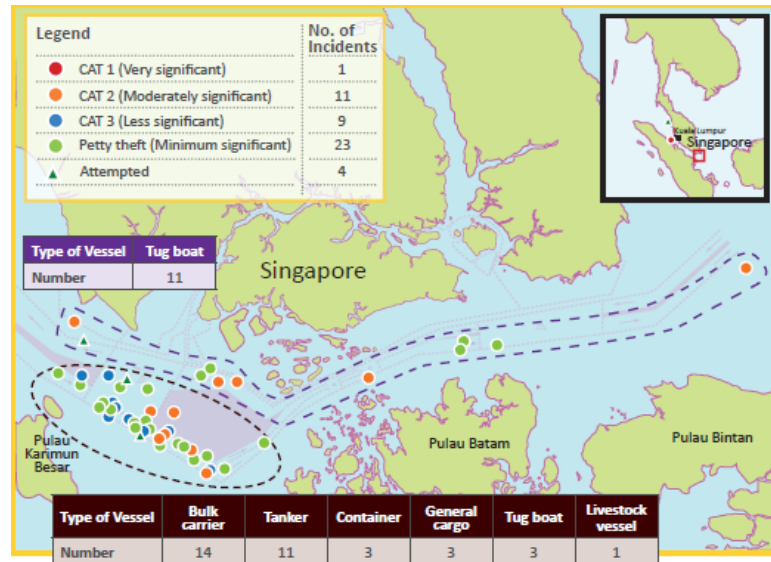
Dalam penyerangan yang ada, mayoritas insiden yang dilaporkan pada tahun 2014 di Asia bersifat oportunistik yang melibatkan pelaku mengambil semua barang yang ada tanpa pandang bulu. Sekitar 54% dari insiden pada tahun 2014 dilaporkan kehilangan barang, suku cadang mesin, barang tanpa jaminan dan uang tunai / aset. Sebanyak 15 insiden kargo dilaporkan pada tahun 2014⁹, 12 di antaranya melibatkan penyedotan bahan bakar / minyak dan tiga pencurian logam pada tongkang yang ditarik oleh kapal tunda. Sekitar 37% dari insiden pada tahun 2014 melaporkan bahwa tidak ada yang dicuri hanya berupa upaya penyerangan terhadap kapal.¹⁰

⁸ ReCAAP ISC Annual Report 2014. Diunduh pada 7 Februari 2021

⁹ ReCAAP ISC Annual Report 2014. Diunduh pada 7 Februari 2021

¹⁰ *ibid*

Gambar 1. 4 Lokasi insiden perompakan dan penyerangan tahun 2014 Selat Malaka¹¹



Pada tahun 2014 terdapat peningkatan aktifitas perompakan dan penyerangan bersenjata terhadap kapal di wilayah Asia dibanding 4 tahun terakhir (2010-2013)¹². Dan juga terdapat peningkatan di wilayah Asia tenggara tepatnya di Selat Malaka. Berikut merupakan peta persebaran aktivitas perompakan dan penyerangan bersenjata terhadap kapal yang terjadi di wilayah Selat malaka pada tahun 2014.¹³ Selat malaka terindikasi sebagai salah satu wilayah yang merupakan hotspot terjadinya perompakan dan penyerangan. Selat malaka dan Singapura merupakan hotspot terjadinya interaksi pelayaran dan docking, dikarenakan letaknya yang strategis dan dikelilingi daratan dan pelabuhan sebagai tempat bersandar kapal. Sehingga seluruh jenis kapal pengangkut yang membawa barang berharga maupun muatan energi menjadi sasaran empuk para pelaku.

¹¹ ReCAAP ISC Annual Report 2014. Diunduh pada 7 Februari 2021

¹² ReCAAP ISC Annual Report 2014. Diunduh pada 7 Februari 2021

¹³ *ibid*

Anderson (2000) dalam Colas & mabee (2010:87) dari perspektif ekonomi, perompakan merupakan fenomena parasitik yang terkait dengan sistem ekonomi yang bergantung pada perdagangan laut.¹⁴ Umumnya proses penyerangan kapal dan pembajakan terjadi pada saat kapal dalam perjalanan bersandar. Terlebih kapal pembawa muatan dan barang yang melewati selat ini merupakan sarana yang digunakan berbagai negara untuk aktivitas ekonomi. Sebagian besar muatan yang dibawa memiliki nilai yang berharga dan bentuknya yang bervariasi mulai dari barang, aset, maupun muatan yang bersifat bahan bakar. Kerugian di selat malaka meliputi berbagai kategori.

Jumlah insiden di Selat Malaka dan Singapura (SOMS) berdasarkan data diatas dapat dipetakan kerugian yang terjadi di wilayah selat malaka sesuai dengan kategori. Insiden *cat 1* (umumnya) menyedot bahan bakar atau minyak kapal oleh pelaku yang naik kapal untuk menyedot bahan bakar minyak. Umumnya *cat 1* para pelaku dipersenjatai dengan senjata dan pisau, melibatkan kelompok yang lebih besar dan terorganisir yang mengambil kendali kapal seperti mengancam, mengikat dan mengunci kru di kabin, menyedot bahan bakar minyak di atas kapal ke kapal tanker tongkang lain yang datang berdampingan; dan sebelum melarikan diri, menghancurkan peralatan komunikasi dan navigasi kapal dan mengambil uang tunai awak dan barang-barang pribadi.¹⁵

Sebagian besar insiden *cat 2* yang dilaporkan di pelabuhan melibatkan pencurian uang tunai dan properti awak kapal. Para pelaku beroperasi dalam

¹⁴ Octavian Amarulla, Yulianto Bayu. 2015 “Bajak laut antara Aden dan Malaka” Hal. 3.

¹⁵ ReCAAP ISC Annual Report 2014. Diunduh pada 7 Februari 2021

kelompok yang relatif lebih besar.¹⁶ Insiden *cat 3* pencurian kecil (*petty theft*) terjadi di kapal saat sedang berada di wilayah selat malaka dan pada saat kapal dalam proses berlabuh. Insiden-insiden ini melibatkan pelaku bertindak oportunistik, tidak melukai atau memperlakukan kru dengan kekerasan dan mengakibatkan sedikit atau tidak ada kerugian ekonomi karena para pelaku melarikan diri ketika kru disiagakan. Insiden mengakibatkan pelaku melarikan diri dengan tangan kosong terjadi pada setengah insiden di selat malaka.¹⁷

Berdasarkan olahan data diatas dapat dikatakan bahwa kerugian ekonomi yang dialami di wilayah selat malaka berupa kerugian materil dan non materil, meskipun insiden *cat 3* lebih sering terjadi dibandingkan insiden *cat 1*, sangat diperlukan sekali kekuatan ekstra untuk kegiatan mengawasi, melindungi, serta menjaga keamanan wilayah maritim kawasan. Kekhawatiran akan ancaman masalah perompakan ini bukanlah masalah yang dapat dianggap enteng, tetapi harus segera dicari jalan keluarnya dan lebih meningkatkan kerjasama antarnegara di Asia Tenggara dan setelah itu barulah meningkatkan kerjasama dengan negar-negara lain diluar kawasan. Insiden keamanan maritim akan sangat merugikan sektor politik dan terlebih lagi ekonomi bagi negara maupun secara regional Asia Tenggara.

Beriringan dengan meningkatnya kejadian perompakan dan penyerangan terhadap kapal pada tahun 2014. Indonesia mengeluarkan gagasan poros maritim dunia yang digagas Indonesia oleh Presiden Jokowi disampaikan dalam Konfrensi

¹⁶ ReCAAP ISC Annual Report 2014. Diunduh pada 7 Februari 2021

¹⁷ *ibid*

Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur ke-9 dihadapan seluruh Kepala Negara anggota Asean, pada tanggal 13 Novemver 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar.¹⁸ Poros Maritim Dunia adalah menjadikan Indonesia sebagai negara maritime yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritime. Poros maritim dunia ini dipahami sebagai sebuah doktrin yang memberi arahan mengenai tujuan bersama (*a sense of common purpose*).¹⁹

Doktrin poros maritim dunia ini menekankan pada berbagai aspek, yang meliputi: realitas, geografis, geostrategis, dan geoekonomi diantara 2 Samudra yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Mengacu pada potensi alami yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu dua pertiga perairan Asia Tenggara merupakan perairan yurisdiksi Indonesia)²⁰ dan bentuk negara yang merupakan negara kepulauan serta kestrategisan letak negara (Indonesia terletak pada posisi silang, yakni di antara dua benua, yaitu Benua Asia dan Australia, menjadi tantangan bagi Indonesia sebagai anggota Asean dan sebagai negara dengan gagasan poros maritim dunia untuk membuktikan bahwa gagasan ini dapat diwujudkan dan dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam menjaga dan mengamankan wilayah selat malaka dalam prosesnya.

¹⁸ <http://www.thejakartapost.com/news/2014/11/14/presenting-maritime-doctrine.html>. Diakses tanggal 3 Februari 2021

¹⁹ *ibid*

²⁰ Yudhoyono, Susilo Bambang. Geopoitik Ka wasan Asia Tenggara: Perspektif Maritim. <http://jakartagreater.com/geopolitik-ka-wasan-asia-tenggara/>. Diakses pada tanggal 26 Januari 2021.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah, Bagaimana pengaruh doktrin Poros Maritim Dunia terhadap keamanan Selat Malaka pada tahun 2014-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh doktrin Poros Maritim Dunia yang dicetuskan oleh Indonesia terhadap keamanan wilayah selat malaka.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Secara teoritik penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi bagaimana pengaruh doktrin Poros Maritim Dunia untuk menanggapi potensi dan ancaman maritim yang ada di wilayah selat malaka.

1.4.2 Manfaat empiris

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dalam memberikan pemahaman tentang Pengaruh doktrin Poros Maritim dunia terhadap keamanan wilayah laut selat malaka. Selanjutnya, penelitian ini juga memberikan wawasan terhadap peneliti berikutnya tentang Keamanan maritim.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Level of Analysis

Menganalisis suatu fenomena yang terjadi dalam hubungan internasional dapat dianalisis melalui beberapa tingkatan dalam suatu kajian yaitu sistem

internasional, domestik, dan individu. Sistem internasional berfokus pada tingkat internasional meliputi kondisi politik, kondisi ekonomi, aliansi antar negara, dan organisasi internasional. Domestik berfokus pada dimensi kehidupan Negara yang meliputi pemerintahan, sistem ekonomi, *national interest*, partai politik dan strategi budaya. Sedangkan Individu yang berfokus pada perseorangan, meliputi aspek-aspek kepribadian, cara pandangan terhadap dunia dan gaya kepemimpinan.²¹

Tingkatan analisis hubungan internasional menurut Rourke dapat dilihat dari *individual-level-analysis* yang disebut sebagai manusia sebagai spesies dan dapat berperan dalam merumuskan suatu kebijakan. Kemudian *State-level analysis* berfokus pada organisasi dan pengorganisasian yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Selanjutnya adalah *system-level analysis* yang berperan sebagai *pressure* eksternal yang dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara.²²

Level of analysis merupakan sebuah pendekatan yang digunakan untuk membantu memahami sebuah masalah dalam kegiatan yang ada didunia. *Level of analysis* terbagi menjadi beberapa hal untuk menentukan rumusan dalam kebijakan luar negeri. Umumnya *level of analysis* berkaitan dengan suatu pola pemikiran dari berbagai pihak, seperti melihat peran negara membuat kebijakan, individu, sistem internasional, kelompok kepentingan, dan atribut nasional.²³ Semua pihak inilah

²¹ Marijke Breuning. 2007. "*Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction*". Palgrave Macmillan: New York. Vol. XVII, Number 3, pp. 179.

²²Cristophe Barbier. "*Chapter Three on 'Levels of Analysis and Foreign Policy.'*". [Daring] [https://www.academia.edu/28941706/Chapter_Three_on_Levels_of_Analysis_and_Foreign_Policy]. diakses Januari 2021. (t.t)

²³McGraw-Hill Higher, 2005. *Level of Analysis* diakses melalui web http://highered.mcgrawhill.com/sites/0072890363/student_view0/chapter3/ diakses pada 20 Februari 2021

yang mempengaruhi perumusan kebijakan luar negara suatu negara. Dengan demikian, peran dari negara, kelompok, individu, sistem internasional dan atribut nasional membuat suatu negara dapat berpengaruh dalam kancah dunia internasional.²⁴

Dalam penulisan ini penulis menggunakan state level analysis, negara sebagai aktor utama dalam interaksi politik menjadi landasan kuat tentang bagaimana proses kebijakan dibuat, perumusan kebijakan dipengaruhi oleh bagaimana sebuah negara memproyeksikan national interestnya dengan menggunakan kekuatan, alat, serta potensi yang dimiliki. dalam kasus ini Indonesia memanfaatkan faktor historis, budaya, serta posisi strategis yang dimiliki untuk menjaga keamanan jalur selat malaka sebagai bentuk mewujudkan dan bentuk implementasi dari kebijakan Poros maritim dunia.

1.5.2 Landasan teori

1.5.2.1 Ancaman

Dalam studi keamanan dan strategi, ancaman diartikan sebagai sebuah situasi di mana agen/individu ataupun kelompok memiliki baik kapabilitas ataupun rencana untuk menimbulkan konsekuensi negatif terhadap agen/individu atau kelompok lain. Dari perspektif yang lebih luas, ancaman dibagi kepada dua kategori, yaitu ancaman terhadap individu, dan ancaman terhadap kolektif atau kumpulan individu. Ancaman terhadap kolektif dapat berbentuk (1) ancaman militer, (2) ancaman ekonomi, atau (3) ancaman budaya. Tilman menyebutkan

²⁴ J. David Singer, 2007. "*The level of Analysis Problem in International Politics*". The Johns Hopkins University Press

bahwa persepsi ancaman suatu negara terhadap negara lain secara umum terdiri dari lima dimensi, yaitu dimensi struktur, dimensi kedudukan geopolitik negara dan kawasan, dimensi sejarah, dimensi sosio-budaya, dan dimensi ekonomi. Menurut Tillman terdapat 5 dimensi ancaman umum, dimensi struktur, dimensi kedudukan geopolitik negara dan kawasan, dimensi sejarah, dimensi sosio budaya, dan dimensi ekonomi.

Ancaman juga berfungsi sebagai alat pengidentifikasi fenomena bagi objek tertentu, definisi ancaman disini merujuk pada fenomena yang membahayakan bagi objek. Dalam penulisan ini fenomena tersebut adalah ancaman-ancaman umum yang terjadi terhadap negara, dan perdagangan internasional. Dalam konstruksinya, ketika ancaman telah teridentifikasi, umumnya disertai dengan metode tindakan preventif atau langkah pencegahan yang harus dilakukan untuk melindungi objek yang terancam. tindakan preventif ini dapat dilakukan oleh aktor yang bersinggungan langsung dengan ancamannya maupun aktor yang memiliki kepedulian terhadap sektor tersebut. Buzan, de Wilde and Waever (1998) mengatakan bahwa hal tersebut merupakan ciri khas atau sebuah karakteristik khusus dari keamanan, penanggulangannya sering kali bersifat ekstrim, dan sangat memungkinkan jika skalanya menjadi konflik militer dan melibatkan instrumen politik dalam prosesnya dan mengurangi pergerakan dan hak-hak sipil secara signifikan.²⁵

²⁵ Buzan, Barry, Ole Wæver, and Jaap de Wilde. 1998. *Security. A New Framework for Analysis*. Boulder: Lynne Rienner Publishers

Umumnya aktor internasional mendefinisikan keamanan dengan mengidentifikasi seberapa banyak ancaman yang termasuk dalam konsep tersebut. Laporan Sekretaris Jenderal PBB tahun 2008 tentang Lautan dan Hukum Laut memberikan garis besar ancaman yang umumnya termasuk (PBB 2008, 18-33). Laporan tersebut membedakan antara tujuh. (1) Pembajakan dan perampokan bersenjata, (2) Terorisme, (3) perdagangan gelap senjata dan senjata pemusnah massal, (4) perdagangan gelap narkoba, (5) penyelundupan dan perdagangan orang melalui laut, (6) penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur dan (7) kerusakan yang disengaja dan melanggar hukum terhadap lingkungan laut.

1.5.2.2 Sekuritisasi Maritim

Kerangka kerja sekuritisasi mengarahkan kita pada dinamika penting: Seperti yang ditunjukkan oleh literatur, sekuritisasi menyiratkan bahwa masalah diperlakukan sebagai masalah yang mendesak dan prioritas utama dan biasanya lebih banyak sumber daya yang kerahkan untuk masalah tersebut²⁶. Menurut Buzan, kepentingan nasional suatu negara sangat menentukan karakter agenda sekuritisasi dari negara tersebut Dalam *People, State and Fear* (1991), Buzan memperluas agenda keamanan tidak sebatas fokus pada isu tradisional militer. Namun demikian, kecenderungan dominasi negara (*state-centrism*) masih tetap ada. Suatu isu dapat dikatakan isu keamanan apabila aktor keamanan menyatakan melalui tindakan *speech act* bahwa isu tersebut merupakan ancaman. Tindakan

²⁶ Bary Buzan. *People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in The Post. London. 1991*

tersebut disebut sebagai sekuritisasi, yang menjadi tawaran *Copenhagen school* dalam penyelesaian suatu ancaman.²⁷

Sekuritisasi Copenhagen School menggunakan tiga bentuk utama, yaitu *speech act*, pendekatan Schmittian terkait keamanan dan politik, serta asumsi yang ada di pendekatan keamanan nasional. Pada konsep ini, 'keamanan' menjadi bagian dari keamanan nasional dimana otoritas yang mengkonstruksi ancaman atau musuh terhadap keamanan nasional adalah negara sebagai aktor keamanan atau sekuritisasi.²⁸ Menurut Buzan, dalam konsep keamanan terdapat sekuritisasi (*securitization*), bahwa setiap isu dapat dianggap sebagai isu keamanan, terutama jika isu tersebut diupayakan untuk diterima oleh masyarakat sebagai sesuatu yang mengancam kondisi keamanan mereka. Dengan kata lain, isu-isu yang sebenarnya bukan isu keamanan dapat menjadi isu keamanan jika terdapat unsur-unsur yang berkaitan dengan ancaman terhadap objek-objek tertentu.²⁹ Dengan begitu dapat diketahui bagaimana menghadapi isu-isu tersebut yang dapat mempengaruhi kedaulatan dan integritas negara, baik ancaman dari luar maupun dari dalam negeri. Buzan menyatakan, "*traditionally, by saying "security," a state representative declares an emergency condition, thus claiming a right to use whatever means are necessary to block a threatening development*".³⁰

Terdapat beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan dalam sekuritisasi. Pertama, proses sekuritisasi. Pada proses ini negara sebagai aktor keamanan

²⁷ Buzan, Barry, Ole Wæver, and Jaap de Wilde. 1998. *Security. A New Framework for Analysis*. Boulder: Lynne Rienner Publishers

²⁸ *ibid*

²⁹ *ibid*

³⁰ *ibid*

melakukan identifikasi terhadap dinamika strategis yang bergerak di lingkungannya, tujuannya mengubah isu-isu dalam dinamika itu menjadi isu keamanan (ancaman riil atau persepsi). Buzan menyebutnya, “*who securitize issues by declaring something – a referent object – existentially threatened*”³¹. Kedua, segala kondisi yang dianggap mendukung dalam proses sekuritisasi (*facilitating conditions*).

Kondisi yang mendukung dalam hal ini adalah kondisi yang mampu membentuk opini publik terhadap suatu isu sehingga aktor memandang isu tersebut merupakan ancaman. Ketiga, unit analisa tentang keamanan (*the units of security analysis*). Yang dijadikan sebagai unit analisa adalah negara dan *referent object*. *Referent object* adalah objek yang dipandang secara eksistensial harus diamankan oleh aktor. Dalam hal ini, seringkali aktor dan *referent object* merujuk pada subjek yang sama yaitu negara. Namun terkadang dalam hal lain, *referent object* merujuk pada subjek masyarakat. Pilih *referent object* bergantung pada subjektivitas aktor dalam mengidentifikasi dinamika di lingkungan strategisnya.

Menurut Buzan, aktor sekuritisasi dapat siapa saja. Namun dalam praktiknya, sekuritisasi juga banyak dilakukan oleh pemimpin politik, birokrasi, pelobi, kelompok oposisi, serta kelompok organisasi lainnya.³² Pemaknaan ‘negara’ tidak saja melekat ‘presiden’ atau ‘perdana menteri’, tapi unsur-unsur lain yang dalam situasi khusus berperan atas nama ‘negara’ menjadi bagian dari aktor sekuritisasi.

³¹ Buzan, Barry, Ole Wæver, and Jaap de Wilde. 1998. *Security. A New Framework for Analysis*. Boulder: Lynne Rienner Publishers

³² Buzan, Barry, Ole Wæver, and Jaap de Wilde. 1998. *Security. A New Framework for Analysis*. Boulder: Lynne Rienner Publishers

Keempat, tindakan pernyataan (*speech act*).³³ Aktor sekuritisasi menilai suatu isu sebagai ancaman. Sebagai contoh, jika presiden atau perdana menteri atau menteri suatu negara mengumumkan peristiwa bencana alam sebagai ancaman, maka segala sumber daya nasional harus diprioritaskan dalam menghadapi ancaman tersebut. Kelima, konstelasi sekuritisasi (*constellations of securitization*). Hal ini terkait pemetaan aktor terhadap *security complex* dengan tujuan menganalisis pola hubungan keamanan dari beberapa kompleksitas keamanan yang berbeda.

Kombinasi tindakan preventif dan responsif untuk melindungi wilayah maritim dari ancaman dan tindakan melanggar hukum yang disengaja. Kata kuncinya adalah: tindakan preventif dan responsif, yang bertujuan baik penegakan hukum sebagai kebutuhan sipil dan militer dan operasi pertahanan sebagai militer, dalam hal ini kebutuhan angkatan laut. “Keselamatan Maritim” adalah “kombinasi dari tindakan preventif dan responsif yang dimaksudkan untuk melindungi domain maritim terhadap, dan membatasi efek dari, bahaya yang tidak disengaja atau alami, bahaya, dan kerusakan lingkungan, risiko atau kerugian”.³⁴

Keamanan maritim adalah tanggung jawab yang tidak memiliki definisi yang jelas dalam hal operasi keamanan maritim: itu adalah tanggung jawab pemerintah, tetapi kekuatan untuk bertindak atas nama negara adalah keputusan berdaulat dengan opsi yang berbeda. Ini memiliki pengaruh kuat pada kolaborasi maritim. Ia tidak memiliki universalitas hukum atau

³³ Christian Bueger. 2015. *What is maritime security*. University of Copenhagen

³⁴ Feldt, Lutz .et al. 2013. “Maritime Security – Perspectives for a Comprehensive Approach”. ISPSW Strategy Series: Focus on Defense and International Security

definisi yang disepakati karena fakta bahwa itu adalah topik yang luas, mencakup banyak bidang kebijakan. Unsur-unsur yang merupakan bagian dari keselamatan maritim adalah; Security of all seafarers and fishermen, Environmental protection, Resource security, access to resources at sea and to the seabed, Security protection from crimes at sea, Security of Sea Lines of Communications, Sovereignty, territorial integrity and political independence, International and national peace and security

1.5.2.3 Foreign Policy

Holsti menjelaskan *Foreign Policy* merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat kebijakan dalam suatu negara untuk menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya dan dikendalikan untuk mencapai *National Interest*.³⁵ Terdapat lima landasan pembuatan *foreign policy* menurut Wittkoff, Kegley dan Scott: *External Sources* yaitu segala sesuatu yang ada di sistem internasional seperti kebijakan dari negara lain, organisasi internasional, konflik, kerja sama, ancaman dan dukungan; *Societal Sources* yaitu interaksi sosial domestik seperti keadaan geografis, etnis, opini publik, nilai, dan norma yang berkembang di masyarakat; *Governmental Sources* merupakan seluruh aktivitas dan pertimbangan dalam lingkup pemerintah serta interaksi berbagai pihak dengan pemerintah; *Role Sources* merupakan peranan atau status dari pemerintah sebagai

³⁵ K.J Holsti. 1992. "*International Politics A framework for Analysis 6th edition*". New Jersey: Simon & Schuster Company.

pembuat keputusan; *Individual Sources* yaitu nilai-nilai yang dimiliki oleh individu seperti ideologi, latar belakang pendidikan, karakter.³⁶

Morgenthau menjelaskan mengenai *national interest* bahwa terdapat dua elemen didalamnya, yaitu pertimbangan pertama berdasarkan pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan kedua mempertimbangkan lingkungan strategis di sekitarnya atau kondisi di luar negaranya.³⁷ Sehingga dalam kaitannya dengan *Foreign Policy* sebuah negara yang berlandaskan *national interest* bukan hanya penilaian kedalam negara saja namun juga ke luar negara tersebut. *National interest* adalah usaha suatu negara dalam memberikan rasa aman terhadap warga negaranya baik dari agresi luar atau dalam negeri itu sendiri, kesejahteraan terhadap rakyatnya, dan melindungi nilai-nilai negara.³⁸ *National interest* yang menjadi tujuan negara lantas diterapkan dalam sebuah *Foreign Policy*, Sehingga *Foreign Policy* merupakan perpanjangan tangan dari *national interest*.

Foreign Policy juga dapat diartikan perilaku negara terhadap lingkungan di sekitarnya, baik negara maupun non-negara seperti organisasi, gerakan masyarakat, atau isu tertentu.³⁹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Foreign Policy* dipengaruhi faktor internal dan eksternal sebuah negara, meliputi ekonomi, kondisi politik

³⁶ Eugene R Wittkoff, Charles W Jr Kegley , dan James M Scott. "*American Foreign Policy sixth edition*". 2003. United States: Thomson Wadsworth

³⁷ Hans J Morgenthau dalam Ken Kiyono. 1969. "*A Study on the Concept of the National Interest of Hans J. Morgenthau as The Standard of American Foreign Policy*". Nagasaki: NAOSITE.

³⁸ Hans J Morgenthau dalam Ken Kiyono. 1969. "*A Study on the Concept of the National Interest of Hans J. Morgenthau as The Standard of American Foreign Policy*". Nagasaki: NAOSITE.

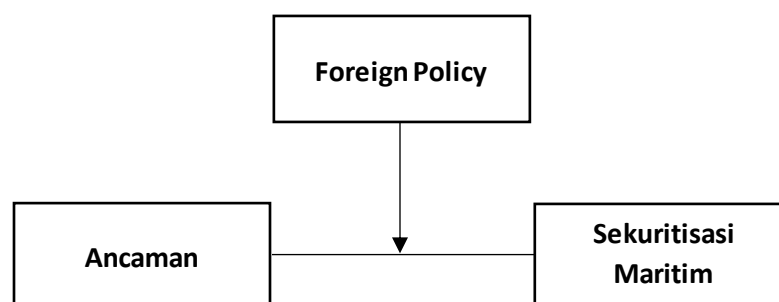
³⁹ Ali Eddin Hillaal dalam Ahmed Aref Al Kafarneh. 2013. "*Decision Making in Foreign Policy*". *Journal of law, policy and Globalization Vol.10*.

domestik, sosial, kelompok masyarakat, kelompok kepentingan, organisasi internasional dan kebijakan negara lain.

Kepentingan nasional diakui sebagai kunci dalam politik luar negeri. Sepanjang mengenai kepentingan nasional, orang bisa berorientasi kepada ideologi atau sistem nilai sebagai pedoman perilaku. Artinya keputusan dan tindakan politik luar negeri yang dilakukan oleh aktor-aktor politik dapat berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan ideologis atau atas pertimbangan-pertimbangan kepentingan

1.5.2.4 Sintesa Pemikiran

Tabel 1.1 Sintesa Pemikiran



Tabel di atas menjelaskan secara singkat alur penelitian mulai dari landasan teori hingga kerangka pemikiran. Garis panah hitam menjelaskan interaksi secara langsung. Ancaman merupakan proses awal untuk mengidentifikasi fenomena yang berpotensi menjadi ancaman, fenomena yang terjadi terhadap referent objek dapat diidentifikasi dan ditetapkan menjadi sebuah isu keamanan oleh aktor keamanan

Foreign Policy adalah pedoman bagi negara dalam memberikan rasa aman terhadap warga negaranya baik dari agresi luar atau dalam negeri itu sendiri, kesejahteraan terhadap rakyatnya, dan melindungi nilai-nilai negara.⁴⁰ Berkesinambungan dengan tujuan dari pembuatan foreign polucy dan mencapai national interest suatu negara sangat menentukan karakter agenda sekuritisasi dari negara tersebut. Terdapat dua elemen di dalam *national interest* , yaitu pertimbangan pertama berdasarkan pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan kedua mempertimbangkan lingkungan strategis di sekitarnya atau kondisi di luar negaranya.⁴¹

Terdapat beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan dalam sekuritisasi. Pertama, proses sekuritisasi; Kedua, segala kondisi yang dianggap mendukung dalam proses sekuritisasi; Ketiga, unit analisa tentang keamanan; Keempat, tindakan pernyataan; Kelima, konstelasi sekuritisasi.

1.6 Hipotesis

Dengan berlandaskan pada latar belakang, kerangka pemikiran, landasan teori serta sintesa pemikiran penelitian, maka penulis memberikan hipotesis sebagai berikut. Ancaman berfungsi sebagai alat pengidentifikasi fenomena bagi objek tertentu, definisi ancaman disini merujuk pada fenomena yang membahayakan bagi objek. Dalam konstruksinya, terdapat tindakan preventif atau langkah pencegahan yang harus dilakukan untuk melindungi objek yang terancam. Pada konsep ini,

⁴⁰ Hans J Morgenthau dalam Ken Kiyono. 1969. "A Study on the Concept of the National Interest of Hans J. Morgenthau as The Standard of American Foreign Policy". Nagasaki: NAOSITE.

⁴¹ Hans J Morgenthau dalam Ken Kiyono. 1969. "A Study on the Concept of the National Interest of Hans J. Morgenthau as The Standard of American Foreign Policy". Nagasaki: NAOSITE.

‘keamanan’ menjadi bagian dari keamanan nasional dimana otoritas yang mengkonstruksi ancaman keamanan nasional adalah negara sebagai aktor keamanan. Perubahan eskalasi yang dilakukan aktor untuk mengubah isu non-keamanan menjadi isu keamanan dilakukan melalui proses sekuritisasi.

Negara sebagai aktor keamanan melakukan identifikasi terhadap dinamika strategis yang bergerak di lingkungannya, tujuannya mengubah isu-isu dalam dinamika itu menjadi isu keamanan. *Foreign Policy* adalah usaha suatu negara dalam memberikan rasa aman terhadap warga negaranya dari ancaman internal maupun eksternal. Sehingga dapat membentuk strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat kebijakan dalam suatu negara untuk menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya dan dikendalikan untuk mencapai *National Interest*. Kepentingan nasional suatu negara sangat menentukan karakter agenda sekuritisasi dari negara tersebut. Sekuritisasi menyiratkan bahwa masalah diperlakukan sebagai masalah yang mendesak dan prioritas utama dan sekuritisasi maritim menjadi tindakan jawaban langsung dari proses sebelumnya sebagai pedoman dan acuan agar diterapkannya foreign policy sehingga negara dapat memfokuskan lebih banyak sumber daya yang kerahkan untuk masalah tersebut⁴².

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian eksplanatif. Penelitian eksplanatif merupakan penelitian yang bertujuan meneliti

⁴² Bary Buzan. *People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in The Post. London*. 1991

variabel-variabel, untuk mengetahui kedudukan serta hubungan variabel satu dengan variabel lainnya melalui pengujian hipotesis dan variabel penilitan.⁴³

Dalam penelitian ini penulis berusaha menjelaskan bagaimana dampak dari visi poros maritim dunia yang diambil pemerintah Indonesia dalam kepemimpinan Jokowi di tahun 2014-2019, penulis berusaha untuk menjelaskan proses Indonesia menjawab tantangan isu keamanan yang ada di selat malaka.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pidato yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2014. Dalam pidatonya Jokowi mengumumkan pandangan Indonesia tentang kemaritiman. Jokowi menyampaikan komitmennya untuk membangun NKRI kembali menjadi poros maritim dunia. Penelitian ini membatasi pada masa jabatan preesiden yang mengajukan dan mewacanakan adanya poros maritim dunia ditujukan untuk melihat keseriusan Indonesia dan Presiden

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder seperti misalnya buku, berita, jurnal, dan artikel. Secara tinjauan pustaka ataupun daring melalui internet. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil pengamatan pihak lain. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara studi pustaka, mengumpulkan berbagai materi yang berkaitan dengan judul penelitian ini dari berbagai sumber yang berupa buku-buku, dokumen-dokumen, dan situs internet.⁴⁴

⁴³ Research Methodology. 2018. "Causal Research (Explanatory Research)" [Online] di [<https://research-methodology.net/causal-research/>]. Diakses 21 September 2021.

⁴⁴ Elmer E. Rasmuson Library. 2018. "*Library Research Process*" [Daring] [<https://library.uaf.edu/lr101-research-process>] Diakses 23 September 2021.

Penulis melakukan observasi isu atau permasalahan yang berkaitan dengan kasus yang sedang diteliti. Observasi yang dilakukan oleh penulis adalah observasi non partisipatif. Observasi ini adalah observasi yang dilakukan tanpa berpartisipasi atau terlibat langsung dengan objek yang akan diobservasi.⁴⁵

1.7.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data atau metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan analisis yang berfokus pada makna sosial, interpretasi, praktik, wacana, dan konstruksi argumen.⁴⁶ Data yang digunakan merupakan data kualitatif dan didukung oleh data statistik

1.7.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi 4 bab. Pembagian bab tersebut akan penulis uraikan gambaran besarnya sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang tersusun atas latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, landasan teori, hipotesis, metodologi penelitian yang terdiri dari definisi konseptual dan operasional, tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta sistematika penulisan.

BAB II bab ini menjelaskan tentang poros maritim dunia itu sendiri dan menjabarkan definisi, tujuan dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan

⁴⁵ NN. 1998. "A Dictionary of Sociology" [Daring] [<https://www.encyclopedia.com/social-sciences/dictionaries-thesauruses-pictures-and-press-releases/non-participant-observation>] Diakses 23 September 2021.

⁴⁶ Jennifer Mason. 2002. "Qualitative Researching". London: Sage Publications.

politik, menjelaskan bagaimana poros maritim dunia menjadi kepentingan nasional. Serta menjelaskan runtutan eskalasi fenomena internal maupun eksternal sehingga berkembang menjadi isu nasional dan internasional dan menjembatani penentuan karakter agenda sekuritisasi dari negara tersebut.

BAB III ancaman dan sekuritisasi, serta korelasinya. Data pertumbuhan atau penambahan upaya sekuritisasi pasca PMD merupakan data pendukung penelitian yang menjelaskan proses identifikasi ancaman-ancaman yang ada di wilayah selat malaka. Bab ini akan terbagi menjadi beberapa sub bab, antara lain dengan menjelaskan definisi dari ancaman, serta menguraikan konstruksi terbentuknya sebuah ancaman. Menjelaskan tindakan Indonesia sebagai aktor menyikapi ancaman yang telah diidentifikasi sehingga dapat menyatakan mengamankan objek dengan kondisi yang mendukung, Sehingga aktor memandang isu tersebut merupakan ancaman. Sekuritisasi menyiratkan bahwa masalah diperlakukan sebagai masalah yang mendesak dan prioritas utama dan biasanya lebih banyak sumber daya yang kerahkan untuk masalah tersebut merupakan analisa langkah Indonesia menyatakan poros maritim dunia, serta upaya dalam mewujudkan visi tersebut sehingga menjadi sebuah kebijakan negara. Serta menganalisa bagaimana dampak yang diberikan dari kebijakan tersebut.

BAB IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan penelitian serta saran.